

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Krisis merupakan suatu hal yang dapat secara tiba tiba datang tanpa disadari. Krisis dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa pandang bulu. Krisis berarti suatu hal yang berbahaya yang sifatnya dapat merusak dan juga berdampak buruk bagi organisasi. Seorang *public relations* dituntut untuk mampu mengendalikan dampak yang dihasilkan dari krisis atau bahkan mencegah terjadinya krisis. Saat krisis terjadi, semua komponen dalam institusi atau organisasi dapat lumpuh. Krisis dapat terjadi dari dua hal, yaitu internal dan juga eksternal organisasi. Humas dalam lembaga pemerintahan, berperan penting pada saat terjadi krisis.

Salah satu cara untuk memperkecil dampak dari krisis yaitu melakukan pencegahan krisis (Pra-Krisis). Setiap Humas harus membuat suatu perencanaan dalam menangani krisis, perencanaan tersebut disebut sebagai Manajemen Krisis. Dengan adanya manajemen krisis, humas dapat mengatur dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika krisis sedang terjadi pada institusi tersebut. Humas bertugas untuk menyelesaikan masalah melalui strategi yang dimiliki oleh institusi atau lembaga dan juga menjadi fasilitator untuk menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal dan juga internal lembaga.

Cutlip, Center dan Broom memberikan definisi Humas dalam fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya. Tugas utamanya yaitu membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat dengan publiknya yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi.¹

Krisis dapat terjadi pada lembaga pemerintahan. Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten Kuningan pun mengalami hal yang sama. Krisis yang terjadi dapat disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal dari Pemda tersebut. Krisis internal terjadi dan disebabkan dari internal lembaga. Sedangkan krisis eksternal berasal dari luar lembaga, seperti masyarakat, lembaga lainnya atau bahkan organisasi organisasi lain.

¹ Cutlip, Center & Broom (2000:6) dalam skripsi Fuad Muajddidi (2017:1).

Berbagai faktor dapat menyebabkan krisis dalam institusi pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. Krisis dapat menyebabkan dampak negatif. Banyak hal dapat dilakukan untuk mengatasi krisis salah satunya dengan mencegah sebelum terjadi. Krisis dapat dicegah sebelum terjadi. Krisis yang terjadi dapat segera berhenti dan tidak memberikan banyak dampak negatif, baik kepada masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab diambilnya tata kelola krisis pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. Salah satunya yaitu, dapat dilihat bahwa tanggapnya pemerintah dalam mengambil tindakan guna memperkecil kemungkinan terjadinya krisis yang dapat berdampak pada pemerintahan. Ada beberapa masalah yang sempat muncul, akan tetapi dengan sigap ditindaklanjuti oleh Humas dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan sehingga memperkecil kemungkinan krisis berkepanjangan.

Salah satu krisis yang terjadi yaitu krisis mengenai penerbitan e-KTP Ahmadiyah dan juga Sunda Wiwitan di Kuningan Jawa Barat. Hal tersebut menjadi masalah karena adanya pro dan kontra dalam pengisian kolom agama masyarakat Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan yang merupakan masyarakat minoritas.

Soal Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan, Sekda : Sepakat dengan Komnas HAM, Tapi....

Jumat, 22 Juli 2016 22:32 WIB

907



BAHAS AHMADIYAH : Suasana dialog Komnas HAM dengan jajaran Pemkab Kuningan tentang persoalan dugaan pelanggaran HAM warga minoritas dalam mendapatkan e-KTP di Ruang Rapat Linggajati, Setda Kuningan, Jumat (22/7). FOTO : taufik/radarcirebon.com.

KUNINGAN – Menanggapi sejumlah permasalahan yang diajukan anggota Komnas HAM dari Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dalam pertemuan di ruang rapat Linggajati, Setda Kuningan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Yosep Setiawan menyatakan apresiasi atas paparan dan temuan Komnas HAM tersebut.

Gambar 1.1
Penanggulangan Krisis Perihal Kolom Agama Pada E-KTP
(Sumber : www.radarcirebon.com, diakses pada : 18/08/2017, pkl 19:05 WIB)

Krisis yang terjadi dari pihak eksternal yaitu telah terjadinya krisis yang diakibatkan oleh temuan dari Anggota Komnas HAM perihal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Di Kabupaten Kuningan masih ada beberapa minoritas masyarakat yang memiliki aliran agama yang berbeda seperti Ahmadiyah dan juga Sunda Wiwitan. Kedua minoritas agama tidak memiliki status agama pada e-KTP. Hal tersebut terjadi karena kedua aliran tersebut tidak termasuk kepada keyakinan (agama) yang diakui di Indonesia. Dengan begitu, dampak yang terjadi adalah tidak

adanya pencantuman pada kolom agama bagi masyarakat Ahmadiyah dan juga Sunda Wiwitan.

Pemda Kabupaten Kuningan pun langsung menjawab perihal tersebut. Menurut Humas Pemda Kabupaten Kuningan, demi menjaga keutuhan bangsa dan juga menghindari konflik maka pihak Humas Pemda Kuningan pun meyakinkan bahwa mereka sangat ingin masalah tersebut selesai. Akan tetapi, setelah melakukan pertimbangan, Humas Pemda Kabupaten Kuningan pun memilih untuk menyelesaikan masalah secara perlahan. Hal yang akan dilakukan yaitu berdiskusi dengan masyarakat Sunda Wiwitan dan juga Ahmadiyah. Akan tetapi untuk saat ini kolom agama masih dikosongkan. Kedua masyarakat minoritas setuju dengan hal tersebut. Hasil dari rapat tersebut menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh Humas Pemda Kabupaten Kuningan dalam menangani suatu hal yang dapat menjadi krisis. Selanjutnya, hasil rapat tersebut akan dikaji ulang oleh Komnas HAM.

Melihat tanggapnya pihak Humas Pemda terhadap krisis, membuat krisis yang terjadi tidak berlangsung lama dan segera ditangani. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti perihal bagaimana pihak Humas Pemda melakukan **“Tata Kelola Komunikasi Krisis pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan”**, sehingga krisis yang terjadi dapat segera ditangani.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah mengenai **“Bagaimana Tata Kelola Komunikasi Krisis pada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan dalam Menghadapi Krisis”**.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui krisis-krisis yang pernah terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan perihal krisis yang terjadi di Kuningan.

3. Untuk mengetahui bagaimana cara Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan melakukan pencegahan terjadinya krisis dengan cara Manajemen Krisis.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi melalui penelitian pada bidang *Public Relation* dalam ranah Pemerintahan dalam menangani krisis yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat mampu mengetahui strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi krisis jika terjadi dalam organisasi yang dijalankannya.

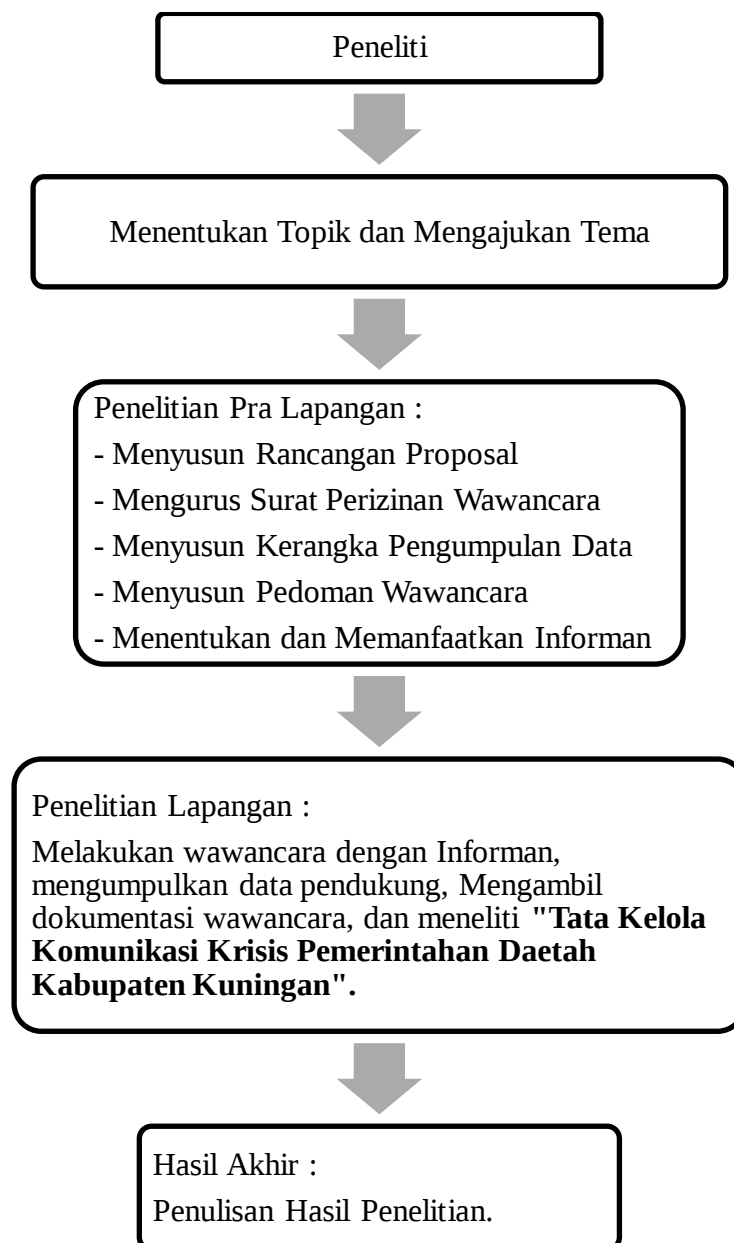
1.4.2.2 Bagi Pemerintah/Institusi

Bagi Pemerintah ataupun Institusi, diharapkan dapat menjadi masukan dan juga referensi atau rujukan agar dapat digunakan untuk menangani krisis yang terjadi pada pemerintahan ataupun institusi lainnya.

1.5 TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu, peneliti harus menyusun tahapan penelitian yang lebih terperinci dan sistematis. Hal tersebut bertujuan agar dapat diperoleh hasil penelitian yang sistematis pula. Maka tahapan penelitian akan diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Gambar 1.2
Tahapan Penelitian



Sumber : Peneliti 2017

1.6 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Kuningan, yang bertempat di Jalan Siliwangi, No.88, Kuningan Jawa Barat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang telah dilakukan yaitu mulai dari Agustus 2017 – Januari 2018. Dengan rincian waktu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rincian Waktu Penelitian
(Sumber : Olahan Peneliti 2017)

No	Kegiatan	Bulan					
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Mencari Informasi Awal (Riset)						
2.	Penyusunan Draft <i>Desk Evaluation</i>						
3.	Penyusunan bab I, II, dan III						
4.	<i>Desk Evaluation</i>						
5.	Pencarian Data dan Wawancara						
6.	Pengolahan Data						
7.	Penyusunan bab IV dan V						
8.	Pengajuan Sidang Skripsi						
9.	Skripsi						

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, berisi mengenai uraian latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II, berisikan tentang tinjauan penelitian terdahulu, teori-teori yang menjadi landasan pokok permasalahan pada penyusunan skripsi dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab III, berisikan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, definisi konsep, unit analisis, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini, berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Terdiri dari semua referensi buku, Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, dan juga Website yang menunjang penelitian.

Lampiran

Berisikan daftar pertanyaan dengan narasumber dan juga dokumentasi penelitian.